

ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP KINERJA PEMBANGUNAN TPST (Studi Pada TPST Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang)

Rahdian Subakti¹, Yaqub Cikusin², Hirshi Anadza³

*Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,
Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia
E-mail: rahdiansubakti01@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi dan peran pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja aparatur desa dalam pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan berdasarkan tiga indikator kinerja publik menurut Mardiasmo, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan BPD mendukung tercapainya penggunaan anggaran pembangunan TPST yang lebih hemat dan tepat sasaran, meskipun tidak secara langsung menghasilkan pendapatan desa. Dari sisi efisiensi, BPD dinilai mampu memfasilitasi komunikasi yang cepat antara pemerintah desa dan masyarakat, sehingga pelaksanaan pembangunan lebih responsif dan tidak boros. Sementara itu, TPST Mulyoagung juga berhasil membuka lapangan kerja dan mengurangi volume sampah ke TPA melalui pemilahan sampah. Namun, pengawasan substantif BPD belum optimal karena keterbatasan kewenangan dan kapasitas sumber daya manusia. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas BPD agar pengawasan pembangunan berbasis masyarakat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: BPD, TPST, Pengawasan, Kinerja, Desa Mulyoagung

Pendahuluan

Desa merupakan entitas pemerintahan terkecil yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prinsip otonomi dan adat istiadat. Seiring dengan diberlakukannya sistem desentralisasi, desa diberikan ruang yang lebih luas untuk mengatur pembangunan dan pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Dalam kerangka ini, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi sebagai lembaga legislatif desa yang bertugas menampung aspirasi, menyusun peraturan bersama kepala desa, serta mengawasi jalannya pemerintahan. Namun dalam pelaksanaannya, fungsi pengawasan BPD seringkali terhambat oleh keterbatasan regulasi, kapasitas sumber daya manusia, dan tidak adanya kewenangan teknis yang memadai.

Ketua BPD Desa Mulyoagung menegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan BPD hanya mencakup aspek kebijakan kepala desa, bukan pengawasan teknis terhadap bawahan kepala desa atau audit pelaksanaan proyek. Padahal, dalam konteks pembangunan desa, terutama proyek-proyek

strategis seperti pengelolaan lingkungan, fungsi pengawasan yang kuat sangat diperlukan untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Tanpa kewenangan dan kapasitas yang cukup, pengawasan yang dilakukan BPD cenderung bersifat prosedural dan tidak mampu menyentuh inti dari proses pembangunan. Hal ini tentu berdampak pada lemahnya kontrol sosial terhadap penggunaan dana publik dan hasil pembangunan di tingkat desa.

Studi kasus TPST di Desa Mulyoagung menjadi gambaran nyata dari lemahnya peran pengawasan BPD dalam proyek pembangunan desa. Proyek TPST yang dilaksanakan pada tahun 2009–2010 muncul bukan dari perencanaan partisipatif desa, melainkan sebagai respons cepat atas somasi dari Dinas Pengairan akibat pencemaran sungai. Bantuan yang diterima desa berasal dari APBN dan disalurkan langsung ke Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), bukan melalui anggaran desa. Oleh karena itu, BPD tidak memiliki kewenangan formal untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana maupun pelaksanaan proyek. Celah ini memperlihatkan bagaimana struktur kelembagaan

yang tidak sinergis dapat menghambat pengawasan dan menciptakan ketimpangan dalam akuntabilitas pembangunan.

Meskipun demikian, TPST Mulyoagung saat ini menjadi model pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang cukup berhasil. TPST ini mampu mengolah 8–9 ton sampah setiap hari, menghasilkan kompos, menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga lokal, serta mengurangi ketergantungan pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Keberhasilan ini menunjukkan bahwa dengan partisipasi masyarakat dan pengelolaan yang tepat, pembangunan desa dapat berjalan efektif. Namun, keberhasilan ini tetap tidak menutupi pentingnya penguatan sistem pengawasan dari hulu ke hilir. Keterlibatan BPD perlu dioptimalkan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, agar proyek seperti TPST tidak hanya berjalan sukses secara teknis, tetapi juga akuntabel secara kelembagaan.

Dengan demikian, penguatan peran BPD dalam pengawasan pembangunan desa menjadi krusial, terutama di era desentralisasi dan meningkatnya kompleksitas masalah lingkungan seperti sampah. Regulasi yang lebih jelas, pelatihan teknis bagi anggota BPD, serta kolaborasi lintas lembaga perlu dikembangkan untuk mendorong BPD berperan secara aktif dan substantif dalam pembangunan desa. Pengalaman Desa Mulyoagung seharusnya menjadi pelajaran berharga bahwa pembangunan berkelanjutan tidak cukup hanya didorong oleh pendanaan dan infrastruktur, tetapi juga membutuhkan sistem pengawasan yang kuat, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis fungsi dan peran pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap kinerja aparatur desa dalam pembangunan TPST?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis fungsi dan peran pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap kinerja aparatur desa dalam membangun TPST

Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Penelitian Manfaat bagi ilmu administrasi publik dari judul ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan pemahaman ilmiah mengenai fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislatif desa yang memiliki peran representatif untuk menyuarakan aspirasi masyarakat serta

mengawal setiap tahapan proses pembangunan di tingkat desa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian Manfaat bagi ilmu administrasi publik Menjadi contoh penerapan teori pengawasan publik di tingkat desa yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian sejenis, atau dalam pengembangan model pengawasan yang lebih adaptif dengan kondisi lokal.

Tinjauan Pustaka

Peran

Peran adalah bentuk perilaku yang dijalankan oleh individu maupun kelompok sesuai dengan kedudukan dalam struktur sosial. Sifatnya dinamis dan dapat berubah seiring perkembangan masyarakat serta tuntutan sosial. Teori peran berfungsi menjelaskan bagaimana stabilitas sosial dipertahankan melalui pembagian fungsi dan tanggung jawab, sekaligus menggambarkan pola interaksi antaranggota masyarakat. Ketidaksesuaian dalam pelaksanaan peran dapat menimbulkan potensi konflik.

Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak yang diberi wewenang untuk mempertanggungjawabkan tindakannya kepada pemberi mandat. Konsep ini menekankan transparansi, keterlibatan masyarakat, serta pencegahan penyalahgunaan kewenangan. Dalam tata kelola pemerintahan, akuntabilitas berperan penting dalam membangun kepercayaan publik, memperkuat fungsi pengawasan sosial, serta menegakkan prinsip good governance yang meliputi partisipasi, keterbukaan informasi, responsivitas, dan keadilan.

Kinerja

Kinerja di sektor publik dinilai melalui indikator ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (3E). Tujuan pengukurannya adalah menilai keberhasilan pelaksanaan program, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, serta memperkuat akuntabilitas pemerintah.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD merupakan lembaga strategis dalam pemerintahan desa yang anggotanya dipilih secara demokratis dari perwakilan wilayah di desa. Keberadaannya memastikan keterwakilan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan serta menjadi wadah penyampaian aspirasi warga (Fauziah, 2020). Sebagai representasi rakyat, BPD tidak hanya menyalurkan aspirasi, tetapi juga berperan penting dalam fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa. Lembaga ini menjadi mediator

antara masyarakat dan pemerintah desa, sehingga kebijakan dan program pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan warga.

Dalam struktur pemerintahan desa, kepala desa bertugas melaksanakan kebijakan, sementara BPD berfungsi mengawasi kinerja agar tetap sesuai ketentuan hukum, transparan, dan demokratis. Selain itu, BPD turut berperan dalam proses pembentukan peraturan desa, sehingga tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (Sugiyono, 2017).

Fokus Penelitian

Penelitian menekankan pada inti wawasan yang diperoleh melalui pengalaman peneliti dan pengetahuan yang didapatkan dari kajian literatur ilmiah (Moleong, 2014). Penelitian ini memfokuskan diri pada analisis fungsi BPD terhadap kinerja aparatur desa pada pelaksanaan pembangunan TPST. Aspek-aspek utama yang diteliti mencakup efektivitas dan dampak terhadap masyarakat setempat terkait adanya pembangunan TPST. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis bagaimana strategi pembangunan TPST yang diharapkan oleh masyarakat, serta mengkaji kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan TPST.

Situs dan Latar Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan oleh penulis di Kantor Ds Mulyoagung Kec Dau Kabupaten Malang. Pemilihan Kantor Desa Mulyoagung didasarkan pada tupoksi aparatur desa untuk menyelenggarakan perencanaan pelaksanaan Pembangunan TPST.

Sumber Data

1. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya tanpa melalui perantara yaitu menjadi subyek penelitian. Data primer dihasilkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi secara langsung yang ditunjukkan kepada informan di Kantor Desa Mulyoagung.
2. Sumber Sekunder Sumber ini mencakup berbagai referensi seperti buku, jurnal, artikel, berita dan fakta lapangan yang diperoleh oleh penulis.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, data primer diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Peneliti perlu cermat memahami informasi yang diberikan narasumber agar hasil penelitian akurat serta relevan dengan topik yang dikaji. Menurut Sugiyono, teknik pengumpulan data meliputi:

1. Wawancara dilakukan melalui tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber terkait analisis fungsi BPD terhadap kinerja aparatur desa dalam pembangunan TPST.
2. Observasi pengamatan langsung di lokasi penelitian untuk memahami kondisi nyata serta membandingkannya dengan teori.
3. Dokumentasi pemanfaatan arsip, peraturan, artikel, maupun sumber resmi lain, termasuk data dari situs Desa Mulyoagung dan catatan aparatur desa, sebagai bahan pendukung penelitian.

Teknik Analisis Data

Menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014), analisis data kualitatif dilakukan secara berkesinambungan, baik saat proses pengumpulan maupun setelah data terkumpul. Proses analisis mencakup empat tahapan utama:

1. Kondensasi Data – proses mereduksi dan menyederhanakan informasi dari catatan lapangan, transkrip wawancara, maupun dokumen sehingga lebih terarah pada fokus penelitian.
2. Pengumpulan Data – data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, lalu dianalisis secara kualitatif dengan menelaah, mendeskripsikan, serta menarik makna dari informasi yang diperoleh.
3. Penyajian Data – hasil data yang telah direduksi disajikan, umumnya dalam bentuk teks naratif, untuk mempermudah pemahaman serta perumusan langkah analisis berikutnya.
4. Penarikan Kesimpulan – tahap akhir berupa penafsiran dan penyimpulan hasil penelitian berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan.

Pembahasan

Pengawasan merupakan aspek penting dalam proses pembangunan desa, karena tidak hanya berfungsi untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana, tetapi juga menjadi instrumen akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. Dalam konteks pembangunan TPST, fungsi pengawasan yang dilakukan memainkan peranan penting dalam mendampingi kinerja aparatur desa.

Pengawasan dilakukan dalam berbagai bentuk, baik internal maupun eksternal, termasuk pengawasan sosial oleh masyarakat. Tujuan utamanya adalah memastikan agar proses pembangunan berjalan efektif, efisien, dan memberikan dampak ekonomi yang nyata kepada masyarakat.

Berdasarkan indikator ekonomi menurut teori kinerja Mardiasmo (2009), fungsi pengawasan BPD dapat membantu menciptakan pengelolaan anggaran yang hemat dan tepat guna. Meskipun tidak secara langsung menghasilkan pendapatan, BPD berperan besar dalam menjaga agar dana desa digunakan sesuai prioritas. Melalui musyawarah dan pengawasan terhadap perencanaan program seperti pembangunan infrastruktur desa atau pemberdayaan ekonomi, BPD memastikan bahwa sumber daya yang terbatas tetap memberi manfaat yang maksimal. Dampak ekonomi TPST pun terasa langsung, seperti pembukaan lapangan kerja dan pendapatan dari penjualan sampah daur ulang, serta secara tidak langsung melalui peningkatan kualitas lingkungan yang berdampak pada penghematan biaya kesehatan dan peningkatan citra desa.

Dari sisi efisiensi, pengawasan BPD mendukung optimalisasi penggunaan sumber daya desa. Efisiensi ini tampak dari bagaimana BPD menyalurkan aspirasi masyarakat tanpa birokrasi yang rumit, tetapi melalui musyawarah yang bersifat langsung dan terbuka. Hal ini mempercepat pengambilan keputusan dan penanganan masalah. Di sisi lain, TPST juga menerapkan sistem efisien dengan melibatkan RT dan RW dalam pengumpulan sampah, sehingga beban kerja TPST menjadi lebih ringan dan biaya operasional dapat ditekan. Kedua pihak menunjukkan sinergi yang baik dalam menciptakan sistem kerja yang hemat biaya dan tenaga namun tetap menghasilkan dampak nyata.

Dalam indikator efektivitas, pengawasan BPD turut mendorong tercapainya tujuan pembangunan TPST secara menyeluruh. Efektivitas tidak hanya dilihat dari terlaksananya program sesuai rencana, tetapi juga pada sejauh mana program tersebut mampu menyelesaikan permasalahan utama di masyarakat, seperti penumpukan sampah dan rendahnya kesadaran lingkungan. Pengawasan BPD membantu memastikan bahwa pembangunan TPST tidak menyimpang dari tujuan awal dan tetap berpihak pada kepentingan warga. Sementara itu, TPST terbukti efektif melalui berbagai hasil nyata di lapangan, seperti lingkungan bersih, pengurangan sampah liar, dan pemanfaatan sampah menjadi sumber ekonomi baru bagi warga.

Secara keseluruhan, analisis fungsi pengawasan BPD dalam pembangunan TPST menunjukkan bahwa lembaga ini memiliki kontribusi strategis dalam mendukung tercapainya

pembangunan desa yang berkelanjutan. Baik dalam aspek ekonomi, efisiensi, maupun efektivitas, pengawasan BPD terbukti mampu memperkuat sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat. TPST menjadi wujud nyata keberhasilan kolaborasi tersebut, di mana pengelolaan sampah tidak hanya menyelesaikan persoalan lingkungan tetapi juga membuka peluang ekonomi baru. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi bagian dari proses demokratisasi pembangunan desa yang berbasis pada keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi aktif masyarakat.

Kesimpulan

Fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Desa Mulyoagung. Dari segi ekonomi, BPD berkontribusi dalam memastikan penggunaan anggaran desa dilakukan secara hemat dan tepat sasaran, sehingga manfaat pembangunan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Secara efisien, BPD menjalankan pengawasan melalui pendekatan partisipatif di tingkat dusun dan RT, yang berdampak pada efektivitas pengumpulan informasi serta pengambilan keputusan yang lebih tepat. Efektivitas pengawasan BPD juga terbukti dalam memastikan pembangunan TPST berjalan sesuai rencana, memberikan hasil nyata seperti lingkungan desa yang bersih, penambahan pendapatan warga, serta berkurangnya pencemaran akibat sampah.

Secara keseluruhan, sinergi antara fungsi pengawasan BPD dan kinerja TPST menghasilkan proses pembangunan yang lebih ekonomis, efisien, dan efektif. Keberhasilan ini menunjukkan pentingnya pengawasan yang aktif, partisipatif, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Dengan memperkuat koordinasi antara BPD, pemerintah desa, dan pengelola TPST, serta mendorong peran kelembagaan lokal seperti RT dan RW, pembangunan berbasis lingkungan dapat diwujudkan secara berkelanjutan demi mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa..

Daftar Pustaka

Sumber Buku:

- Ak, P. D. M., & Mba. (2021). Otonomi & manajemen keuangan daerah: Edisi terbaru. Penerbit Andi.
- Creswell, J. W. (2019). Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif dan campuran.
- Erwan, A. P., & Dyah, R. S. (2007). Metode penelitian kuantitatif: Untuk administrasi publik dan masalah-masalah sosial. Gava

- Media.
- Huberman, A. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*.
<https://www.sidalc.net/search/record/Koha-oai-ecotur:4757/description>
- Mardiasmo, D. M., & Mba, A. (2009). *Akuntansi sektor publik*. Andi.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2014a). *Metode penelitian kualitatif (Edisi revisi)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2014b). *Metode penelitian kualitatif (Edisi revisi)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Prayitno, G., Subagiyo, A., Dinanti, D., & Sari, N. (2021). *Smart village: Mewujudkan SDG's desa berbasis keterpaduan pengelolaan dan inovasi digital*. Universitas Brawijaya Press.
- Soelistyarini, T. D. (2013). *Pedoman penyusunan tinjauan pustaka dalam penelitian dan penulisan ilmiah*.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian bisnis: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D*. Alfabeta.
- Suhardono, E. (2016). *Teori peran: Konsep, derivasi dan implikasinya*. Gramedia Pustaka Utama.
- Tarsito, S. (2014). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Taylor, D., & Procter, M. (2010). *The literature review: A few tips on conducting it*. University of Toronto Writing Center.
<http://ctl.utsc.utoronto.ca/twc/sites/default/files/litreview.pdf>
- Towne, L., & Shavelson, R. J. (2002). *Scientific research in education*. National Academies Press.
<https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=Omkbagaqbj>
- Sumber Jurnal:**
- Anggit, N. (2018). *Analisis kegagalan mekanisme pemalik putaran mesin induk di MV. Meratus Medan 1 [Diploma thesis, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang]*.
- Anggraini, D. (2019). *Analisis pengawasan sistem pengajaran di Edu Smart Learning Center Medan*. Jurnal Ilman: Jurnal Ilmu Manajemen, 7(1).
- Ariani, R. C. (n.d.). *Universitas Brawijaya Fakultas Ilmu Administrasi Jurusan Ilmu Administrasi Publik Malang*.
- Assiddiq, D. U., Bisri, M. H., Handayani, S., Imron, M., & Ambarwati, D. (2023). *Komunikasi pembangunan dan mekanisme bentuk rancangan peraturan desa mengenai tata kelola aset desa*. Jurnal Nomosleca, 9(1), 158–178.
<https://doi.org/10.26905/nomosleca.v9i1.9910>
- Darmawan, M., Trihadiningrum, D. Y., & Appsc, M. (n.d.-a). *Kajian pengolahan sampah di TPST Mulyoagung Bersatu, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang*.
- Darmawan, M., Trihadiningrum, D. Y., & Appsc, M. (n.d.-b). *Kajian pengolahan sampah di TPST Mulyoagung Bersatu, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang*.
- Elviandri, & Perdana, I. (2021). *Pembentukan peraturan desa (Perdes): Tinjauan hubungan kewenangan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)*. Journal Equitable, 6(1), 14–26.
<https://doi.org/10.37859/jeq.v6i1.2679>
- Fauziah, L. A. (2020). *Implementasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembahasan dan penetapan peraturan desa*. Al-Balad: Journal of Constitutional Law, 2(2).
<https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/593>
- Firdaus, B. M., & Maharani, A. E. P. (n.d.). *Implementasi fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap kepala desa di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus*.
- Hasri, M. M., Kustiani, I., Purwadi, O. T., & Siregar, A. M. (n.d.). *Analisis investasi proyek pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Universitas Lampung*.
- Hernawati, D. (2013). *Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle) (Studi pada Tempat Pengolahan Sampah Terpadu di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang)* [Journal article, Brawijaya University].
<https://www.neliti.com/publications/73045/>
- Karuru, P. (2013). *Pentingnya kajian pustaka dalam penelitian*. Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 2(1), 1–9.
<https://doi.org/10.47178/jkip.v2i1.149>
- Malik, S. (2020). *Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jurnal Ius Constituendum, 5(2).
<https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.1740>
- Manoppo, I. R. A., Mantiri, M., & Sambiran, S. (2017). *Fungsi koordinasi pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan (Studi di Desa Buise Kecamatan Siau Timur Kabupaten Sitaro)*. Jurnal Eksekutif, 2(2).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/17412>

- Martiandari, P. (n.d.). Universitas Brawijaya Fakultas Ilmu Administrasi Jurusan Administrasi Publik Minat Administrasi Pemerintahan Malang.
- Mitrakoesoema, N. I., & Ratnamiasih, I. S. E. (2019a). Kepemimpinan dalam upaya meningkatkan motivasi karyawan Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia (APPMI) Jakarta [PhD thesis, Universitas Pasundan].
<http://repository.unpas.ac.id/43071/>
- Mitrakoesoema, N. I., & Ratnamiasih, I. S. E. (2019b). Kepemimpinan dalam upaya meningkatkan motivasi karyawan Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia (APPMI) Jakarta [PhD thesis, Universitas Pasundan].
<http://repository.unpas.ac.id/43071/>
- Onk, K. (2017, January 10). Permendagri Nomor 110 Tahun 2016—BPD. Cipta Desa. <https://ciptadesa.com/permendagri-110-tahun-2016/>
- Permana, T. J., & Trihadiningrum, Y. (2010). Kajian pengadaan dan penerapan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di TPA Km 14 Kota Palangka Raya. ITS.
- Prisa, M. I. (2021). Manajemen pembangunan desa dalam mewujudkan good governance (Studi kasus kegiatan pengaspalan jalan di Kelurahan Sendangadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman) [Undergraduate thesis, Universitas Tidar].
https://repositori.untidar.ac.id/index.php?p=s how_detail&id=10955
- ik Sipil, Universitas Hasanuddin, 6, 1–10.
- Rochaida, E. (2016). Dampak pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi dan keluarga sejahtera di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi*, 18(1).
- Syahputri, A. Z., Fallenia, F. D., & Syafitri, R. (2023). Kerangka berfikir penelitian kuantitatif. *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran*, 2(1).
- Tandibua', I. (n.d.). Pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara.
- Taradebora, A. D. A. L. V. F. T. (2016). Perubahan sosial masyarakat Desa Mulyoagung akibat pembangunan berwawasan lingkungan melalui Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). *Forum Ilmu Sosial*, 43(2).
<https://doi.org/10.15294/fis.v43i2.9356>
- Tiurmaida, H. Aritonang. (n.d.). [Data tidak lengkap].
- Ulum, A. S. (2011). Peran pengukuran kinerja dalam mendukung good governance dalam perspektif agency theory. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 3(1).
<https://doi.org/10.15294/jda.v3i1.1945>
- Zubair, A., & Haeruddin, H. (2012a). Studi potensi daur ulang sampah di TPA Tamanggapa Kota Makassar. *Prosiding Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil, Universitas Hasanuddin*, 6, 1–10.
- Zubair, A., & Haeruddin, H. (2012b). Studi potensi daur ulang sampah di TPA Tamanggapa Kota Makassar. *Prosiding Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil, Universitas Hasanuddin*, 6, 1–10.